



Penanganan lava tour merapi dalam hukum lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam

I Komang Ary Dharma Putra¹, Kadek Julia Mahadewi¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

*E-mail korespondensi: arydharma01z@gmail.com

Received: 18 Agustus 2024 Revised: 20 Desember 2024 Accepted: 29 Desember 2024

Abstrak

Lava Tour Merapi adalah salah satu destinasi wisata berbasis lingkungan yang memanfaatkan lanskap pasca-erupsi Gunung Merapi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata ini memperkenalkan sejarah dan dampak dari bencana alam sekaligus memberikan kesempatan unik bagi pengunjung untuk menjelajahi area yang terkena dampak erupsi dengan kendaraan off-road. Tetapi, dalam pengembangan wisata ini berdampak pada terganggunya keseimbangan hidrologi, dan hilangnya spesies flora yang berfungsi sebagai penahan tanah. Isu kritis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengelola pariwisata, masyarakat lokal, dan pemain komersial. Berdasarkan isu-isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Lava Tour Merapi dalam perspektif hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan Lava Tour Merapi dalam konteks hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui kegiatan *Cimpony Visit Nasional* Vol. 2. Hasil studi menunjukkan perlunya edukasi lingkungan bagi wisatawan dan kerja sama dengan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Regulasi Undang-Undang No 23 Tahun 2024 dapat melindungi lingkungan dan masyarakat di sekitar kawasan wisata Lava Tour Merapi.

Kata Kunci: Wisata Bencana, Lava Tour, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam



Abstract

The Merapi Lava Tour is an eco-tourism destination utilizing the post-eruption landscape of Mount Merapi located in Disaster-Prone Area (KRB) III of Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. This tourism initiative introduces the history and impacts of natural disasters while offering visitors a unique opportunity to explore the affected area using off-road vehicles. However, the development of this tourism activity has disrupted the hydrological balance and led to the loss of flora species essential for soil retention. These critical issues involve multiple stakeholders, including local governments, tourism operators, local communities, and commercial entities. In light of these issues, this study aims to analyze the management of the Merapi Lava Tour from the perspective of environmental law and sustainable natural resource management. A qualitative approach with a descriptive-analytical design was employed to gain an in-depth understanding of the management practices within the context of environmental law and resource conservation, facilitated through the Cimpony Visit Nasional Vol. 2 activity. The findings highlight the need for environmental education for tourists and collaboration with local communities to raise awareness about the importance of conservation. Furthermore, Regulation Law No. 23 of 2024 is instrumental in protecting the environment and the communities surrounding the Merapi Lava Tour area.

Keywords: *Disaster Tourism, Lava Tour, Environmental Law, Natural Resource Management*

Pendahuluan

Lava Tour Merapi adalah salah satu jenis wisata berbasis lingkungan yang memanfaatkan lanskap pasca-erupsi Gunung Merapi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta [1]. Kegiatan ini memperkenalkan detail sejarah dan dampak dari bencana alam sekaligus memberikan destinasi wisata bagi pengunjung untuk menjelajahi area yang terkena dampak erupsi dengan kendaraan *off-road*. Kondisi setelah letusan Gunung Merapi yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010, mewariskan hamparan pasir dengan bebatuan tajam, rumah dan barang-barang warga yang hancur diterjang awan panas. Masyarakat setempat menjadikan lokasi ini sebagai museum alam untuk mengingat bencana alam yang terjadi. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Lava Tour menerima 320.135 pengunjung tahun 2017 dan jumlah ini terus meningkat mencapai 6000 pengunjung setiap hari [2]. Lava Tour, salah satu destinasi wisata paling populer di daerah Yogyakarta, berfungsi sebagai alat pengajaran untuk mencegah bencana gunung berapi di samping meningkatkan ekonomi lokal. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas kegiatan ini, berbagai masalah lingkungan dan pengelolaan sumber daya telah muncul, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut [3].

Lava Tour menjadi salah satu destinasi wisata yang dikategorikan sebagai bagian dari konsep *dark tourism*, dimana dapat memberikan manfaat pendidikan, psikologis, dan sosial kepada wisatawan (Chang, 2014; Light D, 2017; Hartmann et al., 2018). Terlepas dari keuntungan ekonominya, pertumbuhan dan pengembangan destinasi Lava Tour Merapi telah memberikan dampak yang besar terhadap habitat vulkanik yang khas. Penggunaan kendaraan *off-road* yang berlebihan telah menyebabkan erosi, kerusakan tanah, dan hilangnya flora yang berfungsi sebagai penahan tanah. Selain mengganggu keseimbangan hidrologi, hal ini juga membahayakan habitat berbagai spesies tanaman dan hewan asli. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan telah menyebabkan gundukan sampah yang sulit diurai, mencemari tanah



dan air, dan mengurangi pemandangan alam, serta menyebabkan dampak sosial yang signifikan.

Isu kritis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pengelola pariwisata, masyarakat lokal, dan pemain komersial adalah kemungkinan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Lava Tour Merapi [7]. Konflik atas kepemilikan lahan, pembagian keuntungan, dan tugas pengelolaan lingkungan dapat muncul dari koordinasi yang tidak efektif [8]. Selain itu, keberadaan organisasi tidak resmi yang menjalankan wisata tanpa izin membuat pengawasan dan penegakan aturan menjadi lebih sulit, mendorong persaingan yang tidak sehat, serta meningkatkan kemungkinan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Degradasi lahan, gangguan ekologi, dan perusakan vegetasi dapat diakibatkan oleh kegiatan yang tidak terkendali seperti penggunaan kendaraan off-road yang berat. Hukum yang lebih kuat, pembentukan forum percakapan antar pemangku kepentingan, dan pengawasan yang ketat merupakan komponen yang diperlukan dalam strategi terpadu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna mengurangi konflik dan menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Merapi.

Dari sisi hukum, kesesuaian aktivitas Lava Tour Merapi dengan kerangka hukum lingkungan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya kelestarian ekosistem dalam setiap aktivitas manusia, termasuk pariwisata. Namun, implementasi hukum di lapangan sering kali kurang optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan terhadap aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis regulasi yang lebih kuat dan konsisten untuk memastikan keberlanjutan Lava Tour Merapi. Berdasarkan isu-isu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Lava Tour Merapi dalam perspektif hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus bagaimana dampak aktivitas Lava Tour Merapi dapat menjadi wisata edukasi yang menarik bagi wisatawan, serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengelolaan Lava Tour yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada keadilan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis (Alsa, 2003), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan Lava Tour Merapi dalam konteks hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Penelitian penelitian berada di wilayah KRB III kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan dilakukan tanggal 16 Juli 2024, pukul 15.30 WIB, melalui kegiatan *Cimpony Visit Nasional* Vol. 2. Metode pengumpulan data yang melibatkan studi literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti Undang-Undang, peraturan daerah, dan laporan resmi terkait pengelolaan kawasan wisata Lava Tour Merapi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum dan kebijakan yang relevan dalam mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan wawancara, observasi, dan studi kasus secara langsung untuk memperoleh data empiris terkait kondisi lingkungan destinasi wisata.



Hasil dan Pembahasan

Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lava Tour merupakan destinasi wisata yang dibangun oleh masyarakat yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2010 [1]. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di kawasan Lava Tour Merapi perlu ditinjau melalui tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dari sudut pandang lingkungan, langkah-langkah pelestarian sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap ekosistem. Kegiatan wisata yang intensif, seperti penggunaan kendaraan *off-road*, berisiko menyebabkan degradasi tanah dan kerusakan vegetasi yang signifikan. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan berpotensi menghasilkan limbah yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari kawasan. Oleh karena itu, pengelolaan berbasis keberlanjutan harus mencakup langkah-langkah perlindungan lingkungan yang sistematis, seperti penerapan teknologi ramah lingkungan, pembatasan aktivitas wisata, dan program rehabilitasi ekosistem yang terdampak.

Dari perspektif sosial, keberlanjutan sangat merugikan partisipasi aktif masyarakat lokal. Mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pelestarian wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kawasan, sehingga mereka terdorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, masyarakat lokal dapat diedukasi mengenai perlunya perlindungan lingkungan melalui kegiatan operasional wisata, edukasi limbah, atau edukasi wisatawan. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial di kawasan Lava Tour Merapi.

Dari perspektif ekonomi, keberlanjutan berarti membangun model pengelolaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ini mencakup pembagian keuntungan yang adil di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas lokal, dan bisnis. Untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tidak melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh lingkungan, evaluasi kapasitas daya dukung kawasan menjadi penting. Selain itu, diversifikasi produk wisata yang berorientasi pada konservasi dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kawasan. Kawasan Lava Tour Merapi dapat menjadi contoh pengelolaan wisata berbasis sumber daya alam yang bertanggung jawab dengan memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam semua aspek pengelolaan.

Hubungan Antara Pengelolaan Lava Tour dengan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Wisata

Pengelolaan Lava Tour Merapi yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pelaku usaha untuk mengimbangi keuntungan finansial, pelestarian lingkungan, dan partisipasi sosial [10]. Partisipasi masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam upaya ini. Masyarakat dapat menjadi penerima manfaat ekonomi langsung dari aktivitas wisata, selain bertindak sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan wisata. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kawasan, tetapi mendorong komitmen mereka untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh,



masyarakat lokal dapat mengedukasi wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan atau turut serta dalam mengelola limbah yang dihasilkan oleh kunjungan.

Di sisi lain, pelaku wisata, seperti operator tur dan pengusaha lokal, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa aktivitas mereka mengikuti prinsip keberlanjutan. Pelaku usaha yang mematuhi peraturan dan mendukung program konservasi lingkungan dapat membantu pelestarian wilayah atau kawasan secara keseluruhan. Hubungan yang harmonis antara masyarakat, pengelola wisata, dan pelaku usaha dapat diwujudkan melalui forum diskusi reguler untuk membahas masalah-masalah strategis, penentuan peran yang jelas untuk mencegah tumpang tindih tanggung jawab, dan penyusunan kebijakan kolaboratif atau kerja sama memperhatikan kepentingan semua pihak. Metode ini membuat kawasan Lava Tour Merapi dapat menjadi destinasi wisata dan model pengelolaan berbasis partisipasi yang mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Berbasis Hukum Lingkungan

Perbaikan kebijakan pengelolaan Lava Tour Merapi perlu diawali dengan memperkuat regulasi berbasis hukum lingkungan, terutama dengan menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas. Pemerintah daerah harus menetapkan peraturan khusus yang mengatur berbagai aspek operasional aktivitas wisata di wilayah vulkanik ini. Peraturan ini harus mencakup pembatasan jumlah wisatawan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan, standar operasional bagi pelaku wisata untuk mengurangi dampak negatif, dan pengelolaan limbah yang berbasis ramah lingkungan. Kebijakan tidak hanya penting untuk menjaga dan melindungi ekosistem Merapi, tetapi memberikan landasan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan sebagai tambahan dari pembatasan. Operator tur yang melanggar aturan operasi atau tidak memiliki izin resmi harus menghadapi hukuman yang keras untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Di sisi lain, dengan menawarkan keuntungan atau penghargaan lingkungan kepada operator tur yang menggunakan praktik-praktik berkelanjutan, para pelaku wisata untuk lebih proaktif dalam mendukung konservasi kawasan. Penguatan sistem pengawasan yang transparan dan keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pengawas lapangan sangat diperlukan untuk meningkatkan sistem pemantauan wisata ini.

Pendekatan berbasis hukum juga harus didukung oleh upaya-upaya edukasi dan pelatihan untuk masyarakat lokal dan pelaku wisata, dimana program edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian, pelatihan dapat memberikan pengetahuan teknis dalam mengelola kawasan wisata. Misalnya, pelatihan mengenai pengelolaan limbah, konservasi vegetasi, atau penerapan teknologi ramah lingkungan dapat membantu pelaku wisata mengurangi dampak negatif aktivitas mereka. Dengan adanya integrasi antara regulasi, pengawasan, dan edukasi, pengelolaan Lava Tour Merapi dapat lebih terarah dan sesuai dengan kaidah wisata berkelanjutan yang mengedepankan lingkungan.



Kesimpulan

Penanganan Lava Tour Merapi dalam konteks hukum lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa wisata berbasis bencana dapat memberikan manfaat ekonomi. Meskipun Lava Tour memberikan pengalaman unit bagi wisatawan untuk melihat secara langsung dampak erupsi, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Regulasi seperti Undang-Undang No 23 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dalam setiap aktivitas manusia. Selain itu, perlunya edukasi lingkungan bagi wisatawan dan kerja sama dengan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pengelolaan Lava Tour Gunung Merapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan pelestarian lingkungan.

Daftar pustaka

- [1] Z. M. Muktaf, "Wisata Bencana: Sebuah Studi Kasus Lava Tour Gunung Merapi," *J. Pariwisata*, vol. IV, no. 2, pp. 84–93, 2017.
- [2] H. Agustin, M. Rifai, and S. Ediyono, "Ketika Sisa Letusan Gunung Api Menjadi Komoditi Wisata: Analisis Risiko Obyek Wisata Lava Tour Merapi Yogyakarta," *J. Kesehat. Komunitas*, vol. 8, no. 2, pp. 219–228, 2022, doi: 10.25311/keskom.vol8.iss2.1077.
- [3] J. Sasmito and A. Sya'roni, "Peningkatan Pelayanan, Pemasaran dan Keamanan Bagi Penyedia Jeep Wisata," *BERDIKARI J. Inov. dan Penerapan Ipteks*, vol. 5, no. 1, pp. 50–60, 2017, doi: 10.18196/bdr.5118.
- [4] T. Y. Chang, "Dark Tourism: The effects of motivation and environmental attitudes on the benefits of experience," *Rev. Int. Sociol.*, vol. 72, no. 2, pp. 69–86., 2014.
- [5] Light D, "Progress in dark tourism and thanatourism research: An uneasy relationship with heritage tourism," *Tour. Manag.*, vol. 61, pp. 275–301, 2017.
- [6] R. Hartmann, J. Lennon, A. R. Daniel P. Reynolds, A. T. Rosenbaum, and P. R. Stone, "The history of dark tourism," *J. Tour. Hist.*, vol. 10, no. 3, pp. 269–295, 2018.
- [7] A. R. Muhsin and T. B. Prasetya, "Manajemen Keselamatan Pariwisata Di Obyek Wisata Lava Tour Merapi Di Kecamatan Cangkringan Dan Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman," *Enersia Publika*, vol. 4, no. 1, pp. 222–228, 2020.
- [8] I. Ibtly, "Audit Sosial Sebagai Model Integrasi Peningkatan Pemahaman Dan Sensivitas Kewargaan Terhadap Pelayanan Publik," *urnal Ombudsman Drh. DIY*, vol. 22, 2017.
- [9] A. Alsa, *Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- [10] A. Surwiyanta, "Dampak Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial Budaya Masyarakat Di Kawasan Kali Adem," *Media Wisata*, pp. 38–52, 2010.

